

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA (PHK) OLEH PERUSAHAAN *OUTSOURCING* TIDAK BERBADAN
HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 232/Pdt.Sus-PHI/2014
DI PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG)**

INTISARI

Oleh

Mega Yanuarti¹, dan Ari Hernawan²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kota Pangkal Pinang Nomor: 232/Pdt.Sus-PHI/2014 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan menganalisis perlindungan hukum pekerja dalam Perkara Putusan Nomor: 232/Pdt.Sus-PHI/2014 ditinjau dari peraturan yang mengatur tentang Perusahaan *Outsourcing* Tidak Berbadan Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian didukung dengan melakukan wawancara kepada Narasumber untuk mendapatkan penjelasan mengenai data sekunder. Hasil penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara pendekatan kualitatif. Hasil analisis diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa adanya akibat hukum oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kota Pangkal Pinang Nomor: 232/Pdt.Sus-PHI/2014 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengakibatkan tidak adanya keadilan bagi pekerja/buruh dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam Perkara Putusan Nomor: 232/Pdt.Sus-PHI/2014 ditinjau dari peraturan yang mengatur tentang Perusahaan *Outsourcing* Tidak Berbadan Hukum.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, *Outsourcing*, Badan Hukum, Penyelesaian sengketa.

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**ANALYSIS OF DISPUTE SETTLEMENT OF EMPLOYMENT TERMINATION
(PHK) BY NON-LEGAL ENTITY OUTSOURCING COMPANY (CASE STUDY
OF DECISION NUMBER: 232 / Pdt.Sus-PHI / 2014
IN PANGKAL PINANG DISTRICT COURT)**

ABSTRACT

By

Mega Yanuarti³, dan Ari Hernawan⁴

This study aims to determine and analyze between the suitability of the Industrial Relations Court of Pangkal Pinang City's verdict Number: 232 / Pdt.Sus-PHI / 2014 with Law Number 13 of 2003 as well as analyze the legal protection of workers in Court Decision Number: 232 / Pdt.Sus- PHI / 2014 in terms of regulations governing the Legal Entity Outsourcing Company.

This method of research is a normative study, which supported by conducting interviews to get an explanation of secondary data. The results of library research were carried out with document studies and the results were analyzed in a qualitative approach. The results of the analysis were described descriptively.

Based on the results of the study, the authors conclude that there are legal consequences by the Panel of Judges on the Decision of the Industrial Relations Court of Pangkal Pinang District Number: 232 / Pdt.Sus-PHI / 2014 with Law Number 13 of 2003 which resulted in the absence of justice and legal protection for laborers in case verdict number: 232 / Pdt.Sus-PHI / 2014 in terms of regulations governing Non-Legal Entity Outsourcing Company.

Keywords: *Employment Termination, Outsourcing, Legal Entity, Dispute Resolution.*

³ Law Graduate Program Student, Business Law Concentration, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jakarta.

⁴ Lecturer, Faculty of Law, Gadjah Mada, University, Yogyakarta.